

Aplikasi Manajemen Riset Dakwah dalam Penyusunan Modul "Tafsir Sosial" untuk Memberdayakan Komunitas Marginal di Perkotaan

Nandipah Roa'zah¹, Achmad Fachri Amrulloh², Muslimatun Diana Muazaroh³, Diana Elfiyatul Afifah⁴, Sukirno⁵, Moh. Agil Nuruzzaman⁶, Supeno⁷, Munahar⁸

¹⁻⁸ Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk

Corresponding Author*

E-mail: nandipah@updn.ac.id¹, achmadfachriamrulloh@gmail.com²,
Muslimatundianamuazaroh@Updn.Ac.Id³,
Dianaelfiyatulafifah@Updn.Ac.Id⁴, Sukirno@Updn.Ac.Id⁵, Agil@Updn.Ac.Id⁶,
Supeno@Updn.Ac.Id⁷, munahar@updn.ac.id⁸

Article History:

Received: Dec, 2022

Revised: Dec, 2022

Accepted: Dec, 2022

Abstract: Penerapan manajemen penelitian dakwah Islam dalam pengembangan modul "Tafsir Sosial" bertujuan untuk memberdayakan masyarakat perkotaan yang terpinggirkan dengan memberikan bimbingan keagamaan yang relevan secara sosial. Pendekatan ini mengintegrasikan ajaran Islam ilmiah dengan kebutuhan praktis masyarakat, mendorong pemberdayaan melalui pendidikan dan keterlibatan sosial. Penelitian tentang pendidikan dan dakwah Islam menyoroti pentingnya kompetensi intelektual dan spiritual pada kader ulama, yang memainkan peran kunci dalam pemberdayaan masyarakat dan perubahan sosial. Strategi dakwah yang efektif meliputi pendidikan formal, hafalan Al-Qur'an, dan praktik lapangan masyarakat, yang membangun kepercayaan dan partisipasi aktif dalam kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Pengembangan modul yang peka budaya dan relevan secara kontekstual seperti "Tafsir Sosial" dapat meningkatkan dampak dakwah dengan mengatasi masalah-masalah sosial spesifik yang dihadapi oleh penduduk perkotaan yang terpinggirkan. Upaya tersebut sejalan dengan tujuan yang lebih luas tentang moderasi agama dan harmoni sosial yang ditemukan dalam penelitian pendidikan Islam.

Keywords:

Aplikasi Manajemen Riset Dakwah, Penyusunan Modul, Komunitas Marginal, Tafsir Sosial, Perkotaan

Pendahuluan

Revolusi Industri 4.0, yang ditandai oleh integrasi sistem fisik-siber, Internet of Things (IoT), kecerdasan buatan (AI), dan automasi, telah mengubah lanskap sosial-ekonomi dan menuntut adaptasi cepat di hampir semua sektor kehidupan —

Fenomena kemarginalan di perkotaan merupakan realitas sosial yang kompleks dan multidimensional, lahir dari proses urbanisasi yang pesat,

pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, serta transformasi budaya dan sosial yang terjadi secara simultan. Kota-kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan kota-kota metropolitan lainnya, menjadi magnet bagi migrasi penduduk dari desa ke kota dengan harapan memperoleh kehidupan yang lebih baik. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua pendatang mampu beradaptasi dan memperoleh akses yang setara terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial. Akibatnya, terbentuklah kelompok-kelompok masyarakat marjinal yang hidup di pinggiran kota, kawasan kumuh, atau bahkan di tengah-tengah kota namun terpinggirkan secara sosial, ekonomi, dan budaya. Kemarginalan ini tidak hanya ditandai oleh kemiskinan material, tetapi juga keterasingan sosial, keterbatasan akses terhadap layanan publik, serta lemahnya partisipasi dalam kehidupan sosial-keagamaan (Said & Pratama, 2020).

Marginalisasi di perkotaan seringkali diperparah oleh struktur sosial yang hierarkis dan eksklusif, di mana kelompok-kelompok tertentu—seperti pekerja informal, buruh migran, anak jalanan, perempuan kepala keluarga, dan komunitas minoritas—mengalami diskriminasi dan stigmatisasi. Mereka kerap kali tidak memiliki kekuatan tawar dalam menentukan arah kebijakan publik, bahkan seringkali menjadi objek eksploitasi ekonomi dan politik. Selain itu, modernisasi dan globalisasi membawa perubahan nilai dan gaya hidup yang cenderung individualistik, sehingga solidaritas sosial dan kohesi komunitas semakin melemah. Dalam konteks ini, kemarginalan tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga kultural dan psikologis, di mana individu atau kelompok merasa terasing, tidak diakui, dan kehilangan identitas sosialnya.

Di sisi lain, urbanisasi juga membawa tantangan baru bagi kehidupan beragama di perkotaan. Kota menjadi ruang pertemuan berbagai latar belakang agama, budaya, dan ideologi, sehingga terjadi pluralitas dan bahkan fragmentasi identitas keagamaan. Dalam situasi seperti ini, dakwah Islam menghadapi tantangan besar untuk tetap relevan dan mampu menjawab kebutuhan spiritual, sosial, dan psikologis masyarakat urban yang sangat heterogen. Dakwah konvensional yang bersifat monologis, normatif, dan top-down seringkali tidak mampu menembus sekat-sekat sosial dan kultural yang membatasi interaksi antara *da'i* dan *mad'u*, khususnya di kalangan komunitas marjinal (Mitlin, 2018).

Kebutuhan akan pendekatan dakwah transformatif menjadi sangat mendesak dalam konteks kemarginalan perkotaan. Dakwah transformatif adalah pendekatan dakwah yang tidak hanya berfokus pada penyampaian pesan-pesan normatif agama, tetapi juga berorientasi pada perubahan sosial, pemberdayaan, dan advokasi bagi

kelompok-kelompok marjinal. Dakwah transformatif menuntut da'i untuk memahami secara mendalam realitas sosial, ekonomi, dan budaya mad'u, serta mampu merancang strategi dakwah yang kontekstual, partisipatif, dan solutif. Pendekatan ini menempatkan dakwah sebagai proses dialogis dan interaktif, di mana da'i dan mad'u saling belajar, berbagi pengalaman, dan bersama-sama mencari solusi atas problematika yang dihadapi.

Salah satu karakteristik utama dakwah transformatif adalah kemampuannya untuk beradaptasi dengan dinamika masyarakat urban yang sangat cair dan dinamis. Dakwah tidak lagi terbatas pada mimbar-mimbar masjid atau majelis taklim, tetapi merambah ke ruang-ruang publik, komunitas-komunitas marjinal, bahkan ke dunia digital dan media sosial. Studi tentang komunitas Pemuda Hijrah di Bandung, misalnya, menunjukkan bagaimana dakwah di kalangan anak muda urban dapat bertransformasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, penggunaan media sosial, serta pengemasan pesan-pesan agama yang relevan dengan kebutuhan dan gaya hidup generasi milenial. Dakwah digital menjadi sarana efektif untuk menjangkau kelompok-kelompok yang selama ini sulit disentuh oleh dakwah konvensional, seperti anak jalanan, pekerja informal, dan komunitas marjinal lainnya.

Selain itu, dakwah transformatif juga menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi, advokasi sosial, dan penguatan kapasitas individu maupun komunitas. Metode dakwah bil hal—yakni dakwah melalui tindakan nyata seperti pendampingan, advokasi, pelatihan keterampilan, distribusi zakat-infaq-sedekah, dan penguatan ekonomi mikro—terbukti efektif dalam membangun kepercayaan, solidaritas, dan kemandirian komunitas marjinal. Pendekatan ini tidak hanya memberikan solusi atas masalah-masalah praktis yang dihadapi masyarakat, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kritis dan semangat kolektif untuk melakukan perubahan sosial secara berkelanjutan.

Transformasi dakwah di lingkungan urban juga menuntut inovasi dalam komunikasi dan media. Penelitian tentang komunitas Muslimah di perkotaan menunjukkan bahwa dakwah yang interaktif, dialogis, dan adaptif terhadap tantangan multikultural mampu menjadi jembatan pemersatu di tengah perbedaan (Setia & Dilawati, 2021). Penggunaan media digital, seperti YouTube, Instagram, dan WhatsApp, memungkinkan pesan-pesan dakwah tersebar lebih luas dan diterima oleh berbagai lapisan masyarakat, termasuk kelompok marjinal yang selama ini terpinggirkan dari arus utama dakwah. Namun, digitalisasi dakwah juga membawa tantangan baru, seperti risiko penyebaran informasi yang tidak akurat, fragmentasi

otoritas keagamaan, dan komersialisasi agama (Tuğal, 2009). Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan dan kurasi konten dakwah yang berkualitas, kredibel, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat urban yang dinamis.

Kontekstualisasi pesan dakwah menjadi kunci utama dalam menjawab realitas kemarginalan di perkotaan. Da'i dituntut untuk mampu membaca karakter, kebutuhan, dan kecenderungan mad'u, serta merancang pesan dakwah yang relevan dengan isu-isu aktual yang dihadapi komunitas marjinal, seperti kemiskinan, pengangguran, kekerasan, disintegrasi sosial, dan krisis identitas. Dakwah tidak lagi sekadar mengajak kepada kebaikan secara abstrak, tetapi juga memberikan solusi konkret atas problematika kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, pendekatan tafsir sosial terhadap ajaran Islam menjadi sangat penting, di mana nilai-nilai agama diinterpretasikan secara kontekstual dan aplikatif sesuai dengan realitas sosial masyarakat urban.

Pentingnya pendekatan dakwah transformatif juga tercermin dalam upaya membangun inklusivitas dan toleransi di tengah pluralitas masyarakat perkotaan. Dakwah yang eksklusif dan rigid cenderung memperkuat sekat-sekat sosial dan memperdalam kemarginalan, sedangkan dakwah yang inklusif, dialogis, dan adaptif mampu menjadi jembatan pemersatu dan penguat kohesi sosial. Pengalaman dakwah di komunitas-komunitas marjinal, seperti Majelis Taklim Sabilu Taubah, menunjukkan bahwa pendekatan yang humanis, dialogis, dan berbasis kebutuhan nyata mampu meningkatkan partisipasi, membangun solidaritas, dan memperkuat identitas keagamaan di tengah kemarginalan.

Dalam konteks ini, peran da'i sebagai agen perubahan sosial menjadi sangat sentral. Da'i tidak hanya berfungsi sebagai penyampai pesan agama, tetapi juga sebagai fasilitator, pendamping, dan advokat bagi kelompok-kelompok marjinal. Da'i dituntut untuk memiliki sensitivitas sosial, kemampuan komunikasi yang efektif, serta keterampilan dalam pemberdayaan komunitas. Inovasi metodologi dakwah menjadi keniscayaan, di mana da'i harus mampu mengembangkan berbagai strategi dan media dakwah yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan komunitas marjinal, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam.

Secara teoritis, pendekatan dakwah transformatif sejalan dengan paradigma pemberdayaan masyarakat (community empowerment) dan pembangunan sosial inklusif. Dakwah tidak lagi dipandang sebagai proses satu arah, tetapi sebagai proses dialogis dan partisipatif yang melibatkan mad'u sebagai subjek aktif dalam perubahan sosial. Pendekatan ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antara

berbagai aktor, seperti pemerintah, lembaga keagamaan, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal, dalam merancang dan melaksanakan program-program dakwah yang berorientasi pada pemberdayaan dan keadilan sosial.

Dalam praktiknya, dakwah transformatif di perkotaan dapat diwujudkan melalui berbagai model dan strategi, seperti pengembangan pusat-pusat belajar, rumah singgah, pendampingan dan advokasi, pelatihan keterampilan, distribusi zakat-infaq-sedekah, taman pustaka, paket kesehatan, santunan sosial, dan pendidikan keterampilan kerja (Muttaqin, 2021). Setiap model dakwah harus disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan komunitas sasaran, serta didukung oleh data dan analisis sosial yang akurat. Monitoring dan evaluasi secara berkala juga diperlukan untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan program dakwah.

Akhirnya, realitas kemarginalan di perkotaan menuntut adanya transformasi paradigma dakwah dari yang bersifat normatif dan eksklusif menjadi dakwah yang transformatif, inklusif, dan berbasis kebutuhan nyata. Dakwah transformatif tidak hanya berorientasi pada perubahan individu, tetapi juga perubahan sosial yang lebih luas, mencakup aspek ekonomi, budaya, dan politik. Dengan demikian, dakwah dapat menjadi instrumen strategis dalam membangun masyarakat perkotaan yang inklusif, berdaya, dan harmonis, serta mampu mengatasi berbagai bentuk kemarginalan yang ada (Sulastyawati, 2020).

Gagasan pengabdian yang berupaya menjawab masalah riil di masyarakat, khususnya pada komunitas marjinal perkotaan, menuntut integrasi antara manajemen riset sebagai kerangka kerja dan tafsir sosial sebagai konten utama. Integrasi ini lahir dari kesadaran bahwa problematika sosial di masyarakat urban sangat kompleks, multidimensi, dan dinamis, sehingga membutuhkan pendekatan yang sistematis, partisipatif, dan berbasis data. Manajemen riset berperan sebagai fondasi metodologis yang memastikan setiap langkah pengabdian—mulai dari identifikasi masalah, perumusan tujuan, perancangan intervensi, hingga evaluasi dampak—dilakukan secara terstruktur, terukur, dan adaptif terhadap perubahan sosial yang terjadi. Sementara itu, tafsir sosial berfungsi sebagai ruh atau konten yang menghidupkan setiap program pengabdian dengan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan pemberdayaan, sehingga solusi yang dihasilkan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga bermakna secara sosial dan spiritual (Gomes et al., 2017).

Manajemen riset sebagai kerangka kerja menuntut adanya pemetaan kebutuhan dan potensi komunitas secara partisipatif. Proses ini melibatkan anggota komunitas sebagai subjek aktif, bukan sekadar objek intervensi, sehingga setiap

program yang dirancang benar-benar menjawab kebutuhan nyata dan sesuai dengan konteks lokal (Govigli et al., 2020). Pendekatan partisipatif ini juga mendorong terjadinya knowledge co-creation, di mana pengetahuan lokal dan akademik saling melengkapi untuk menghasilkan solusi inovatif dan berkelanjutan. Dalam praktiknya, tahapan manajemen riset meliputi: (1) identifikasi dan pemetaan masalah melalui riset lapangan, wawancara, dan diskusi kelompok terfokus; (2) analisis kebutuhan dan potensi komunitas; (3) perancangan program intervensi berbasis data; (4) implementasi program secara kolaboratif; dan (5) monitoring serta evaluasi dampak secara berkala. Setiap tahapan ini harus didukung oleh data yang valid dan analisis yang komprehensif agar intervensi yang dilakukan benar-benar efektif dan berkelanjutan.

Tafsir sosial sebagai konten pengabdian menekankan pentingnya pemahaman mendalam terhadap realitas sosial, budaya, dan psikologis komunitas sasaran. Pesan-pesan agama dan nilai-nilai kemanusiaan diinterpretasikan secara kontekstual agar relevan dengan problematika yang dihadapi masyarakat marjinal, seperti kemiskinan, keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan diskriminasi sosial. Tafsir sosial juga mendorong inklusivitas, toleransi, dan penghargaan terhadap keberagaman, sehingga pengabdian yang dilakukan mampu menjadi jembatan pemersatu di tengah pluralitas masyarakat urban. Dalam konteks dakwah, tafsir sosial mengarahkan da'i untuk tidak hanya menyampaikan pesan normatif, tetapi juga menjadi fasilitator perubahan sosial, advokat hak-hak komunitas, dan pendamping dalam proses pemberdayaan.

Integrasi antara manajemen riset dan tafsir sosial menghasilkan model pengabdian yang adaptif, partisipatif, dan berorientasi pada pemberdayaan. Model ini menuntut inovasi metodologi, di mana program pengabdian tidak hanya berfokus pada aspek material, tetapi juga spiritual dan sosial. Contohnya, dalam pengelolaan keuangan sosial Islam, integrasi antara manajemen riset dan tafsir sosial terbukti mampu mempercepat transformasi komunitas miskin menuju kesejahteraan melalui program-program terintegrasi seperti zakat, wakaf, dan pelatihan keterampilan. Studi tentang revitalisasi tradisi Mapalus di Minahasa Utara juga menunjukkan bahwa manajemen pendidikan Islam transformatif yang terintegrasi dalam kurikulum dan program sosial mampu mendorong perubahan sosial yang signifikan di tingkat komunitas (Bevilacqua et al., 2022; Claes et al., 2021). Selain itu, pengalaman Muhammadiyah dalam mengaktualisasikan teologi Al-Ma'un dalam tata kelola organisasi membuktikan bahwa integrasi nilai-nilai teologis dan manajemen modern

dapat menghasilkan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat (Widiastuti et al., 2022).

Dalam implementasinya, integrasi ini juga menuntut adanya kolaborasi lintas sektor, baik dengan pemerintah, lembaga keagamaan, organisasi masyarakat sipil, maupun sektor swasta. Kolaborasi ini penting untuk memperkuat jejaring sosial, memperluas jangkauan program, dan memastikan keberlanjutan dampak pengabdian. Selain itu, monitoring dan evaluasi secara berkala menjadi kunci untuk mengidentifikasi tantangan, mengukur efektivitas program, dan melakukan perbaikan berkelanjutan. Dokumentasi proses dan hasil pengabdian juga sangat penting sebagai sumber pembelajaran dan referensi bagi pengembangan model pengabdian di komunitas lain.

Tujuan utama dari program pengabdian berbasis riset dan partisipasi komunitas adalah menghasilkan dampak nyata yang berkelanjutan melalui tiga output utama: (a) modul yang kontekstual, (b) peningkatan kapasitas komunitas, dan (c) model pengabdian yang terdokumentasi. Ketiga output ini saling terkait dan menjadi fondasi penting dalam menjawab kebutuhan riil masyarakat serta memastikan keberlanjutan program pengabdian.

Pengembangan modul yang kontekstual bertujuan menyediakan materi pembelajaran, pelatihan, atau intervensi yang relevan dengan kebutuhan, karakteristik, dan tantangan spesifik komunitas sasaran. Modul kontekstual tidak hanya berisi teori, tetapi juga praktik, studi kasus, dan solusi yang telah disesuaikan dengan kondisi lokal. Proses penyusunan modul ini melibatkan analisis kebutuhan komunitas, partisipasi aktif anggota masyarakat, serta validasi oleh para ahli dan praktisi. Modul yang dikembangkan berbasis pada hasil riset lapangan, masukan dari komunitas, dan adaptasi terhadap dinamika sosial-budaya setempat, sehingga mampu meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan motivasi peserta dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Penggunaan teknologi, seperti e-module berbasis MOOC, juga terbukti efektif dalam memperluas akses dan meningkatkan kualitas pembelajaran komunitas, dengan tingkat validitas dan efektivitas yang tinggi menurut para ahli. Modul yang kontekstual menjadi alat utama dalam proses pemberdayaan, karena mampu menjembatani pengetahuan ilmiah dengan kearifan lokal, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembelajaran dan perubahan sosial.

Peningkatan kapasitas komunitas merupakan tujuan strategis yang dicapai melalui pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi yang terstruktur. Kapasitas

komunitas meliputi kemampuan individu dan kelompok dalam mengidentifikasi masalah, merancang solusi, mengambil keputusan, serta mengelola sumber daya secara mandiri dan berkelanjutan. Proses ini dilakukan melalui pendekatan partisipatif, di mana anggota komunitas dilibatkan secara aktif dalam setiap tahapan program, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi (Sasmita et al., 2021). Pelatihan yang diberikan tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga pada penguatan soft skills seperti kepemimpinan, komunikasi, kerja sama tim, dan pengambilan keputusan kolektif. Studi kasus di berbagai wilayah menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas komunitas berdampak pada meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, pengelolaan sumber daya, serta penguatan kelembagaan lokal (Parker et al., 2020). Selain itu, program pemberdayaan yang efektif juga mendorong terbentuknya kelompok kerja masyarakat, peningkatan kesadaran kritis, dan tumbuhnya rasa kepemilikan terhadap program yang dijalankan. Dengan demikian, peningkatan kapasitas komunitas menjadi kunci utama dalam menciptakan perubahan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.

Model pengabdian yang terdokumentasi adalah hasil akhir yang sangat penting untuk memastikan replikasi, adaptasi, dan pengembangan program di masa depan. Dokumentasi model pengabdian mencakup seluruh proses, mulai dari identifikasi masalah, perancangan intervensi, pelaksanaan, hingga evaluasi dan refleksi. Model ini disusun secara sistematis, dilengkapi dengan panduan, instrumen, dan indikator keberhasilan yang dapat digunakan oleh berbagai pihak, baik akademisi, praktisi, maupun komunitas lain yang ingin mengadopsi atau mengadaptasi program serupa (Mahajan et al., 2022). Dokumentasi yang baik juga memuat pembelajaran, tantangan, solusi, serta inovasi yang muncul selama pelaksanaan program, sehingga menjadi sumber pengetahuan kolektif yang dapat memperkaya praktik pengabdian masyarakat. Model pengabdian yang terdokumentasi tidak hanya berfungsi sebagai arsip, tetapi juga sebagai alat advokasi, pengembangan kebijakan, dan peningkatan kualitas program di masa mendatang (Zimmerman et al., 2018). Dengan adanya model yang terdokumentasi, keberhasilan dan dampak program dapat diukur, dievaluasi, dan disebarluaskan secara lebih luas, sehingga memperkuat jejaring kolaborasi dan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Tinjauan Pustaka

A. Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat

Dakwah dalam tradisi Islam pada awalnya identik dengan aktivitas ceramah, khutbah, atau pengajian yang bersifat satu arah, di mana da'i atau mubaligh menjadi pusat otoritas pengetahuan dan jamaah berperan sebagai pendengar pasif. Model dakwah konvensional ini menekankan pada transfer pengetahuan agama, penguatan aspek kognitif, dan penanaman nilai-nilai moral melalui komunikasi verbal. Namun, seiring perkembangan zaman dan kompleksitas tantangan sosial, ekonomi, serta budaya yang dihadapi masyarakat, paradigma dakwah mengalami pergeseran mendasar menuju pendekatan pemberdayaan masyarakat yang lebih partisipatif, transformatif, dan kontekstual (Ramdhani, 2018).

Paradigma baru dakwah menempatkan masyarakat bukan lagi sebagai objek, melainkan subjek aktif dalam proses perubahan. Dakwah tidak hanya bertujuan meningkatkan pemahaman agama, tetapi juga mendorong masyarakat untuk mengenali potensi, menganalisis masalah, dan merancang solusi secara mandiri. Dalam konteks ini, dakwah menjadi instrumen rekayasa sosial (social engineering) yang berorientasi pada perubahan struktur sosial, ekonomi, dan budaya ke arah yang lebih adil, sejahtera, dan beradab. Dakwah pemberdayaan (dakwah bil hal) menekankan aksi nyata, pendampingan, dan penguatan kapasitas masyarakat agar mampu menghadapi tantangan hidup secara mandiri dan berkelanjutan.

Implementasi dakwah pemberdayaan tercermin dalam berbagai program yang mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan pengembangan kapasitas individu dan komunitas. Misalnya, para penyuluh agama di Kampung Dakwah Punggur, Lampung, tidak hanya memberikan ceramah, tetapi juga melakukan pendampingan melalui tahapan penyadaran, transformasi pengetahuan dan keterampilan, serta evaluasi strategi. Materi yang diberikan meliputi pemberantasan buta huruf Al-Qur'an, penguatan keluarga sakinah, pemberdayaan zakat dan wakaf, penguatan ekonomi, hingga pencegahan narkoba dan HIV/AIDS. Hasilnya, terjadi penurunan masalah sosial, peningkatan ekonomi keluarga miskin produktif, dan penurunan angka buta huruf Al-Qur'an (Yuliasih, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa dakwah yang berorientasi pada pemberdayaan mampu memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Pergeseran paradigma ini juga menuntut perubahan peran da'i dari sekadar penyampai pesan menjadi fasilitator, motivator, dan pendamping masyarakat. Da'i harus mampu membangun komunikasi dialogis, memahami konteks sosial-budaya, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan program. Dakwah tidak lagi sekadar menyelesaikan masalah masyarakat dari luar, tetapi memfasilitasi masyarakat untuk memahami diri, potensi, dan masalahnya sendiri,

serta membangun kapasitas untuk mengatasinya. Dengan demikian, dakwah menjadi proses kolektif yang melibatkan masyarakat secara utuh, baik dalam aspek spiritual, sosial, ekonomi, maupun budaya.

Selain itu, integrasi dakwah dengan pendekatan pengembangan masyarakat (community development) memperkuat prinsip-prinsip keadilan, persamaan, partisipasi, penghargaan, dan tolong-menolong (ta'awun). Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh, baik aspek material maupun spiritual, sehingga mereka mampu mengambil keputusan, mengelola sumber daya, dan mandiri dalam menghadapi tantangan hidup. Pemberdayaan masyarakat merupakan proses berkelanjutan yang meliputi tahapan penyadaran, penguatan kapasitas, dan pendayaan, di mana masyarakat didorong menjadi subjek aktif, bukan sekadar objek intervensi.

Transformasi dakwah juga didukung oleh pemanfaatan teknologi digital, yang memungkinkan penyebaran pesan agama secara lebih luas, cepat, dan interaktif. Model dakwah digital, seperti yang dilakukan oleh Habib Husein Ja'far Al Hadar, memanfaatkan media sosial, podcast, webinar, dan konten edukatif yang relevan dengan kehidupan sehari-hari dan isu-isu kontemporer. Pendekatan ini membuat pesan agama lebih mudah dipahami, kontekstual, dan mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat (Basri, 2016). Namun, tantangan seperti penyebaran paham ekstrem dan kurangnya pengawasan di dunia digital juga perlu diantisipasi.

Dalam praktiknya, dakwah pemberdayaan juga diadopsi oleh berbagai lembaga keagamaan, pesantren, dan kelompok masyarakat berbasis agama. Misalnya, Muhammadiyah mengintegrasikan dakwah dengan program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan sosial, serta memanfaatkan media digital untuk memperluas jangkauan dan efektivitas dakwah (Rofiq, 2020). Model serupa juga diterapkan oleh kelompok JSN Cengkir Gading, yang menggabungkan kegiatan keagamaan dengan program ekonomi kerakyatan, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan religiusitas masyarakat secara bersamaan (Sudiapermana & Muslikhah, 2020).

Secara teoretis, dakwah pemberdayaan didasarkan pada integrasi antara teori pengembangan masyarakat dan prinsip-prinsip dakwah Islam. Teori pengembangan masyarakat menekankan pentingnya partisipasi, kemandirian, dan keberlanjutan, sedangkan dakwah Islam menekankan nilai-nilai profetik, humanisasi, dan transformasi sosial. Prinsip-prinsip utama dakwah pemberdayaan meliputi ukhuwwah (persaudaraan), ta'awun (tolong-menolong), keadilan, partisipasi, dan

persamaan. Strategi dakwah yang digunakan meliputi pendekatan hikmah (kebijaksanaan), mau'izah (nasihat yang baik), dan mujaadalah (dialog), yang semuanya bertujuan membangun kesadaran, motivasi, dan kapasitas masyarakat (Lubis, 2020).

Meskipun secara konseptual dakwah pemberdayaan menawarkan solusi yang lebih relevan dan efektif, implementasinya menghadapi berbagai tantangan, seperti resistensi budaya, keterbatasan sumber daya, dan kompleksitas masalah sosial. Oleh karena itu, diperlukan inovasi metodologi, penguatan kapasitas da'i, dan sinergi antara lembaga keagamaan, pemerintah, dan masyarakat sipil. Implikasi dari paradigma baru ini adalah terwujudnya masyarakat yang lebih mandiri, adil, dan sejahtera, serta terciptanya ruang-ruang sosial yang inklusif, dialogis, dan transformatif.

B. Manajemen Riset Dakwah sebagai Kerja Profesional

Manajemen riset dakwah sebagai kerja profesional merupakan proses sistematis yang melibatkan serangkaian tahapan terintegrasi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi, guna memastikan efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan program dakwah dalam menjawab tantangan zaman. Dalam konteks modern, dakwah tidak lagi dipahami sekadar sebagai aktivitas spiritual atau seremonial, melainkan sebagai kerja profesional yang menuntut tata kelola berbasis prinsip-prinsip manajemen ilmiah dan adaptif terhadap dinamika sosial, teknologi, serta kebutuhan masyarakat.

Tahap pertama dalam siklus manajemen riset dakwah adalah perencanaan. Perencanaan merupakan fondasi utama yang menentukan arah, tujuan, dan strategi dakwah. Proses ini meliputi analisis kebutuhan masyarakat, penetapan visi-misi, perumusan tujuan, identifikasi sumber daya, serta penyusunan program kerja yang terukur dan relevan. Dalam praktiknya, perencanaan dakwah yang baik harus berbasis pada data riset lapangan, melibatkan partisipasi stakeholder, serta mempertimbangkan aspek lingkungan internal dan eksternal. Misalnya, lembaga dakwah seperti Baitul Mal Tazkia memulai perencanaan dengan melakukan assessment, pengumpulan data, persiapan SDM, dan penyusunan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Jalaludin et al., 2021). Perencanaan yang matang akan memudahkan proses implementasi dan meminimalisir risiko kegagalan program.

Tahap kedua adalah pelaksanaan (implementasi), yaitu realisasi dari rencana yang telah disusun ke dalam aksi nyata di lapangan. Pelaksanaan dakwah profesional

menuntut adanya pembagian tugas yang jelas, koordinasi antar tim, serta penggunaan metode dan media yang sesuai dengan karakteristik sasaran dakwah. Dalam pelaksanaan, penting untuk menjaga fleksibilitas agar dapat menyesuaikan dengan dinamika dan tantangan yang muncul di lapangan. Contohnya, pelatihan dakwah di pesantren atau organisasi masyarakat dilakukan dengan menerapkan kurikulum, pembentukan kelompok kerja, serta pelaksanaan program secara terstruktur dan konsisten. Keberhasilan pelaksanaan sangat dipengaruhi oleh kualitas SDM, ketersediaan sarana-prasarana, serta komitmen seluruh pihak yang terlibat.

Tahap ketiga adalah monitoring (pengawasan), yang berfungsi untuk memastikan seluruh proses pelaksanaan berjalan sesuai rencana dan standar yang telah ditetapkan. Monitoring dilakukan secara berkala melalui kunjungan lapangan, laporan kemajuan, serta observasi langsung terhadap aktivitas dakwah (Widyastri, 2022). Monitoring yang efektif memungkinkan deteksi dini terhadap hambatan, penyimpangan, atau masalah yang muncul, sehingga dapat segera dilakukan perbaikan. Dalam praktiknya, monitoring dapat dilakukan melalui dua cara utama: kunjungan lapangan oleh tim pengawas dan analisis laporan kemajuan dari setiap unit pelaksana program. Monitoring juga berperan sebagai sarana pembinaan dan motivasi bagi pelaksana dakwah agar tetap berorientasi pada tujuan bersama.

Tahap keempat adalah evaluasi, yaitu proses penilaian terhadap seluruh rangkaian kegiatan dakwah untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan, efektivitas strategi, serta dampak program terhadap masyarakat (Permatasari, 2022). Evaluasi dilakukan secara periodik, baik di akhir program maupun secara berkala, dengan menggunakan indikator kinerja yang terukur. Evaluasi mencakup dua aspek utama: evaluasi perencanaan (apakah program sesuai visi-misi dan kebutuhan masyarakat) dan evaluasi pelaksanaan (apakah program berjalan efektif dan efisien). Hasil evaluasi menjadi dasar untuk perbaikan, inovasi, dan pengambilan keputusan strategis pada siklus berikutnya. Evaluasi juga penting untuk akuntabilitas dan transparansi lembaga dakwah kepada stakeholder dan masyarakat luas.

Penerapan siklus manajemen riset dakwah ini telah terbukti meningkatkan profesionalisme, akuntabilitas, dan dampak dakwah di berbagai lembaga, mulai dari pesantren, masjid, organisasi masyarakat, hingga lembaga filantropi (Fahmi & Attatmimi, 2022). Dalam era digital, prinsip-prinsip manajemen dakwah juga diadaptasi dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk perencanaan berbasis data, pelaksanaan melalui platform digital, monitoring secara daring, dan evaluasi berbasis analisis data. Dengan demikian, manajemen riset dakwah sebagai kerja profesional tidak hanya menjamin keberhasilan program, tetapi juga memperkuat

posisi dakwah sebagai agen perubahan sosial yang relevan dan responsif terhadap kebutuhan zaman.

C. Tafsir Sosial sebagai Metode Refleksi-Aksi

Tafsir sosial sebagai metode refleksi-aksi merupakan pendekatan penafsiran Al-Qur'an yang menempatkan teks suci tidak hanya sebagai sumber ajaran normatif, tetapi juga sebagai inspirasi transformasi sosial yang responsif terhadap realitas masyarakat. Pendekatan ini lahir dari kesadaran bahwa Al-Qur'an hadir untuk membimbing manusia dalam seluruh dimensi kehidupan, termasuk dalam menghadapi problematika sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang terus berkembang. Secara historis, tafsir sosial berkembang dari paradigma tekstual-linguistik menuju pendekatan yang lebih kontekstual dan partisipatif, di mana penafsiran tidak berhenti pada pemahaman literal, melainkan berlanjut pada aksi nyata yang mendorong perubahan sosial (Zulyadain et al., 2022).

Teori yang mendasari tafsir sosial sebagai metode refleksi-aksi berakar pada beberapa konsep kunci dalam tradisi keilmuan Islam dan pemikiran kontemporer. Pertama, konsep *maqāṣid al-sharī'ah* (tujuan-tujuan syariat) dan *maṣlaḥah* (kemaslahatan) menjadi landasan epistemologis utama. Tafsir sosial menekankan bahwa penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an harus diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan umum, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar pemenuhan ritual formal. Kedua, teori *double movement* yang dikembangkan oleh Fazlur Rahman menjadi kerangka metodologis penting. Teori ini menekankan dua gerak utama dalam penafsiran: (1) memahami konteks historis turunnya ayat (*asbāb al-nuzūl*) dan (2) mengaktualisasikan pesan universal ayat dalam konteks sosial kekinian. Dengan demikian, tafsir sosial tidak hanya merefleksikan makna teks, tetapi juga mendorong aksi transformatif yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

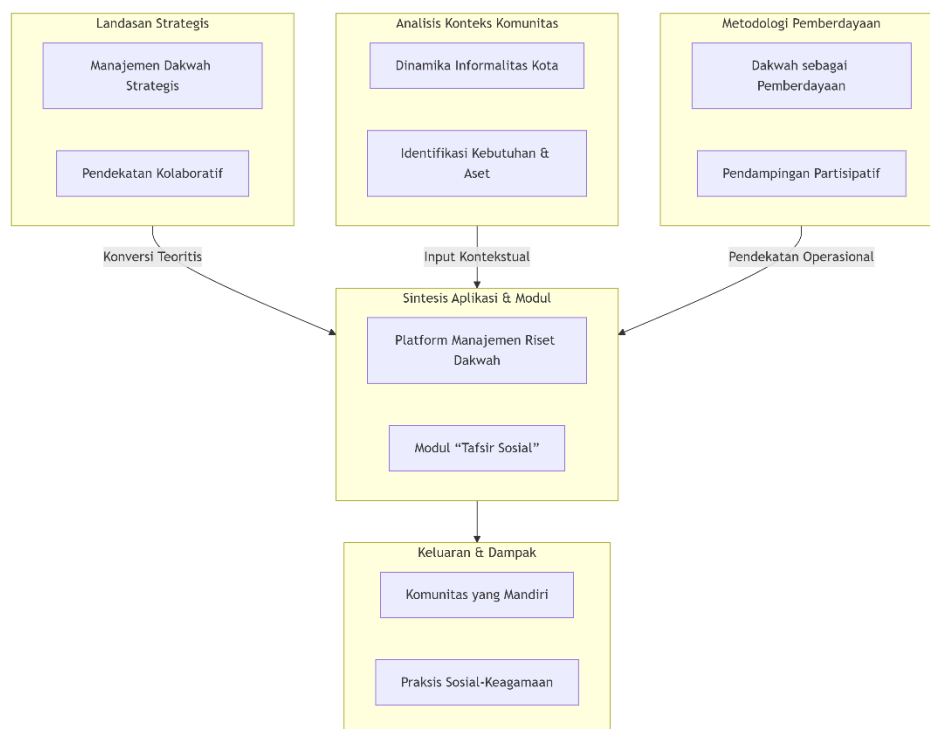
Modul tafsir sosial sebagai refleksi-aksi biasanya terdiri dari beberapa tahapan. Pertama, refleksi kritis terhadap realitas sosial, di mana penafsir dan masyarakat diajak untuk mengidentifikasi masalah-masalah sosial yang dihadapi, seperti ketidakadilan, kemiskinan, diskriminasi, atau kerusakan lingkungan. Tahap ini menuntut keterbukaan terhadap data empiris dan dialog dengan berbagai pihak. Kedua, analisis teks Al-Qur'an secara tematik (*maudhū'ī*) dan kontekstual, dengan memperhatikan prinsip-prinsip *qawā'id al-tafsīr* (kaidah penafsiran) yang progresif dan inklusif. Penafsiran dilakukan dengan mempertimbangkan makna literal, historis, dan sosial, serta mengaitkannya dengan nilai-nilai universal seperti keadilan, persamaan, dan kemanusiaan. Ketiga, aksi sosial sebagai implementasi hasil

penafsiran, di mana masyarakat didorong untuk melakukan perubahan nyata, baik melalui advokasi, pemberdayaan, maupun gerakan sosial yang berlandaskan nilai-nilai Qur'ani.

Tafsir sosial juga sangat dipengaruhi oleh pemikiran para tokoh pembaharu seperti Muhammad Abduh, Sayyid Qutb, Fazlur Rahman, dan Quraish Shihab, yang menekankan pentingnya penafsiran yang responsif terhadap tantangan zaman dan kebutuhan masyarakat (L. Maulana, 2018). Dalam konteks Indonesia, model tafsir sosial juga berkembang melalui karya-karya seperti Tafsir al-Azhar oleh Hamka, Tafsir al-Misbah oleh Quraish Shihab, dan Tafsir At-Tanwir oleh Muhammadiyah, yang mengintegrasikan nilai-nilai sosial, budaya lokal, dan semangat pemberdayaan. Pendekatan ini juga mendorong penggunaan bahasa dan simbol-simbol lokal agar pesan Al-Qur'an lebih mudah dipahami dan diinternalisasi oleh masyarakat, seperti yang dilakukan dalam Tafsir Al-Munir oleh AGH Daud Ismail di Bugis.

Secara metodologis, tafsir sosial sebagai refleksi-aksi menuntut keterampilan hermeneutika kritis, kemampuan membaca realitas sosial, dan keberanian untuk melakukan ijtihad dalam merespons isu-isu kontemporer seperti keadilan gender, pluralisme, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup. Abdullah Saeed, misalnya, mengembangkan metode tafsir kontekstual yang menekankan pentingnya memahami perkembangan sosial, budaya, dan politik dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Pendekatan ini juga menuntut kolaborasi antara ulama, akademisi, dan aktivis sosial agar tafsir tidak terjebak dalam menara gading akademik, tetapi benar-benar menjadi motor perubahan sosial.

D. Kerangka Implementasi



Gambar 1. Kerangka Implementasi

Metode

A. Lokasi dan Profil Mitra

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Kampung Kota X, sebuah kawasan permukiman padat dan informal yang terletak di Kelurahan Y. Kawasan X dikenal sebagai salah satu kantong kemiskinan perkotaan dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi —sekitar 27.500 jiwa/km²—serta tingginya proporsi penduduk yang bekerja di sektor informal seperti pemulung, buruh bongkar muat, pedagang kaki lima, pekerja rumah tangga, dan ojek pangkalan. Secara geografis, Kota X berada di tepi aliran Sungai, wilayah yang dari waktu ke waktu rentan mengalami banjir dan degradasi lingkungan akibat kurangnya sistem drainase dan penataan ruang. Di sisi barat dibatasi kawasan komersial “Citra Business District”, sedangkan sisi timur berbatasan dengan jalur rel kereta aktif, yang keseluruhannya menciptakan tekanan ruang bagi warga.

Selain masalah ekologis dan infrastruktur, kawasan ini menghadapi persoalan sosial yang kompleks, dimana rendahnya akses terhadap layanan kesehatan, keterbatasan fasilitas pendidikan nonformal, serta minimnya ruang publik yang layak dan aman untuk interaksi sosial. Pendataan awal tim pengabdian menemukan bahwa

63% warga tidak memiliki dokumen kependudukan lengkap, yang berdampak pada sulitnya memperoleh layanan perlindungan sosial dan fasilitas pemerintah. Banyak keluarga tinggal di hunian semi-permanen dengan status kepemilikan lahan yang tidak jelas, sehingga muncul kekhawatiran penggusuran setiap kali ada proyek penataan kota. Kondisi-kondisi ini menunjukkan bahwa kemarginalan tidak sekadar berkaitan dengan kemiskinan ekonomi, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, kultural, dan politik.

Dari perspektif dakwah, Kota X mencerminkan realitas umat perkotaan yang berada dalam tekanan struktural tetapi juga memiliki potensi modal sosial melalui keberadaan Majelis Taklim Al-Ikhlâs, Komunitas Ibu-ibu Penggerak Kota X, serta Forum Pemuda Sungai Kota X. Ketiga organisasi lokal ini menjadi mitra strategis dalam program pengabdian, sebab mereka memiliki basis massa yang kuat dan akses langsung kepada warga. Meski demikian, aktivitas dakwah yang berjalan selama ini lebih berfokus pada ritual keagamaan, belum menyentuh dimensi pemberdayaan sosial-ekonomi secara sistematis. Di sinilah relevansi penerapan pendekatan manajemen riset dakwah menjadi signifikan, karena mampu membantu komunitas memetakan masalah secara partisipatif, merumuskan kebutuhan prioritas, sekaligus melahirkan modul “Tafsir Sosial” yang kontekstual.

Lokasi ini dipilih bukan hanya karena tingkat kemarginalannya, tetapi juga karena karakteristik warganya yang inklusif dan terbuka terhadap inovasi pengembangan kapasitas. Observasi lapangan menemukan adanya antusiasme warga terhadap kajian keagamaan yang dikaitkan dengan persoalan hidup sehari-hari—mulai dari pengelolaan usaha mikro, advokasi hak atas ruang kota, hingga penguatan solidaritas sosial. Kampung Kota X juga memiliki struktur komunitas yang relatif mapan, sehingga memudahkan implementasi Participatory Action Research (PAR) sebagai pendekatan riset yang melibatkan warga sebagai subjek aktif. Melalui PAR, warga terlibat dalam pemetaan masalah (social mapping), diskusi kelompok terarah, serta proses perancangan modul dakwah berbasis tafsir sosial yang sesuai dengan konteks lokal.

B. Pendekatan: Participatory Action Research (PAR) dan Research and Development (R&D)

Pendekatan Participatory Action Research (PAR) dan Research and Development (R&D) merupakan dua metode penelitian yang sangat berpengaruh dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pendidikan, sosial, dan pengembangan masyarakat. Keduanya memiliki karakteristik, tujuan, dan

tahapan yang berbeda, namun sama-sama bertujuan untuk menghasilkan perubahan yang signifikan dan berkelanjutan.

Participatory Action Research (PAR) adalah pendekatan penelitian yang menekankan pada keterlibatan aktif partisipan, terutama mereka yang mengalami langsung permasalahan sosial, dalam seluruh proses penelitian. PAR memprioritaskan pengetahuan berbasis pengalaman (*experiential knowledge*) untuk mengatasi masalah yang disebabkan oleh sistem sosial yang tidak adil dan merugikan, serta untuk membayangkan dan mengimplementasikan alternatif perubahan sosial yang lebih baik (Chevalier & Buckles, 2019). Dalam PAR, partisipasi dan kepemimpinan orang-orang yang mengalami isu menjadi kunci utama, di mana mereka tidak hanya menjadi objek penelitian, tetapi juga subjek yang berperan aktif dalam merancang, melaksanakan, menganalisis, dan mengambil tindakan berdasarkan hasil penelitian.

PAR berkembang dari tradisi penelitian aksi yang diperkenalkan oleh Kurt Lewin pada pertengahan abad ke-20, yang awalnya digunakan untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Namun, seiring waktu, PAR berkembang menjadi pendekatan yang lebih transformatif, terutama dalam konteks gerakan sosial, anti-kolonialisme, keadilan sosial, dan pemberdayaan komunitas marginal. Dalam praktiknya, PAR melibatkan enam tahapan utama: membangun hubungan, menetapkan praktik kerja, membangun pemahaman bersama tentang isu, observasi dan pengumpulan data, analisis kolaboratif, serta perencanaan dan pelaksanaan aksi. Setiap tahapan dilakukan secara kolaboratif antara peneliti dan komunitas, dengan tujuan utama menghasilkan pengetahuan yang dapat langsung digunakan untuk aksi sosial yang membebaskan dan memberdayakan.

Salah satu kekuatan utama PAR adalah kemampuannya untuk menghasilkan perubahan sosial yang nyata melalui keterlibatan langsung komunitas dalam proses penelitian. Pengetahuan yang dihasilkan bukan hanya untuk kepentingan akademis, tetapi untuk aksi nyata yang dapat mengatasi ketidakadilan dan meningkatkan kesejahteraan komunitas (Lenette, 2022). Namun, PAR juga menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidaksesuaian dengan infrastruktur penelitian institusional, risiko kooptasi, ketimpangan kekuasaan, dan desentralisasi kontrol (Benjamin-Thomas et al., 2018). Untuk mengatasi tantangan ini, peneliti PAR perlu membangun jaringan yang mendukung, mengembangkan komunitas kritis, melakukan refleksi kritis, mendistribusikan kekuasaan secara adil, dan belajar mempercayai proses kolaboratif.

Selain itu, PAR juga menuntut adanya refleksi kritis dan kesadaran akan dinamika kekuasaan yang terjadi antara peneliti dan komunitas. Peneliti harus mampu menanggalkan posisi dominan dan membuka ruang dialog yang setara, sehingga pengetahuan yang dihasilkan benar-benar merefleksikan kebutuhan dan aspirasi komunitas. Dalam konteks pendidikan, PAR sering digunakan untuk mengembangkan kurikulum, modul pembelajaran, dan program pemberdayaan yang relevan dengan kebutuhan lokal, serta untuk meningkatkan partisipasi dan kepemilikan komunitas terhadap hasil penelitian (Kidd & Kral, 2005).

Research and Development (R&D) adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan produk baru atau menyempurnakan produk yang sudah ada melalui serangkaian tahapan yang sistematis dan terstruktur. R&D awalnya banyak digunakan dalam dunia industri untuk menghasilkan inovasi produk yang dibutuhkan pasar, namun kini telah banyak diadopsi dalam bidang pendidikan, sosial, dan teknologi. Dalam konteks pendidikan, R&D digunakan untuk mengembangkan perangkat pembelajaran, media, modul, kurikulum, dan berbagai produk edukatif lainnya yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan keterlibatan peserta didik (Ozano et al., 2020).

Tahapan R&D umumnya meliputi: identifikasi potensi dan masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi desain, revisi desain, uji coba produk, revisi produk, uji coba pemakaian, revisi produk akhir, dan produksi massal. Setiap tahapan dilakukan secara berurutan dan iteratif, di mana hasil dari satu tahapan menjadi dasar untuk tahapan berikutnya. Salah satu model R&D yang paling terkenal adalah model Borg & Gall, yang banyak digunakan dalam penelitian pendidikan untuk mengembangkan dan menguji keefektifan produk-produk inovatif (Reinganum, 1985).

Keunggulan utama R&D terletak pada kemampuannya untuk menghasilkan produk yang valid, efektif, dan adaptif terhadap kebutuhan pengguna. Proses validasi dan uji coba yang ketat memastikan bahwa produk yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan dapat memberikan dampak positif yang signifikan. Namun, R&D juga memiliki tantangan, seperti kebutuhan sumber daya yang besar, waktu yang lama, dan kompleksitas proses pengembangan. Oleh karena itu, peneliti yang menggunakan pendekatan R&D harus memiliki kesabaran, konsistensi, dan kemampuan manajerial yang baik untuk mengelola seluruh tahapan penelitian (Cusack et al., 2018).

Dalam implementasinya, R&D sering dikombinasikan dengan pendekatan lain, seperti model ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation), model 4D (Define, Design, Develop, Disseminate), dan model Lee & Owens, untuk menyesuaikan dengan konteks dan kebutuhan penelitian (Díaz-Arévalo, 2022). Setiap model memiliki keunggulan dan kekhasan tersendiri, namun prinsip dasarnya tetap sama, yaitu menghasilkan produk yang inovatif, valid, dan bermanfaat bagi pengguna (Zuber-Skerritt, 2018).

Dalam beberapa kasus, pendekatan PAR dan R&D dapat diintegrasikan untuk menghasilkan produk yang tidak hanya inovatif, tetapi juga relevan dan diterima oleh komunitas sasaran. Melalui PAR, komunitas dilibatkan secara aktif dalam proses identifikasi masalah, perancangan, dan evaluasi produk, sehingga produk yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka (Shamrova & Cummings, 2017). Sementara itu, pendekatan R&D memastikan bahwa produk yang dikembangkan melalui proses yang sistematis, valid, dan dapat diuji keefektifannya (Savin-Baden & Wimpenny, 2007).

Integrasi kedua pendekatan ini sangat relevan dalam pengembangan modul pembelajaran, program pemberdayaan masyarakat, dan inovasi sosial lainnya, di mana keberhasilan produk sangat bergantung pada partisipasi aktif dan kepemilikan komunitas. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya bermanfaat secara akademis, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup komunitas sasaran.

C. Tahapan Program

1. Fase 1 (Asses)

Fase pertama dalam program pengabdian masyarakat, yaitu tahap “Assess” atau penilaian, merupakan fondasi penting yang menentukan arah dan efektivitas intervensi selanjutnya. Pada fase ini, riset kebutuhan (needs assessment) dan pemetaan aset (asset mapping) dilakukan secara sistematis untuk memahami secara mendalam kondisi, potensi, serta tantangan yang dihadapi oleh komunitas sasaran. Proses ini tidak hanya berfokus pada identifikasi masalah atau kekurangan yang ada di masyarakat, tetapi juga menyoroti kekuatan, sumber daya, dan kapasitas yang dapat dimobilisasi untuk mendukung perubahan positif dan berkelanjutan.

Riset kebutuhan adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan kebutuhan komunitas, baik yang bersifat fisik, mental, sosial, maupun struktural. Tujuan utama dari riset kebutuhan adalah memperoleh informasi yang valid dan komprehensif agar keputusan intervensi yang diambil benar-benar

relevan dan berdampak. Dalam praktiknya, riset kebutuhan melibatkan berbagai metode pengumpulan data, seperti survei, wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus (FGD), observasi partisipatif, hingga analisis data sekunder dari sumber-sumber resmi. Pendekatan partisipatif sangat dianjurkan, di mana anggota komunitas dilibatkan secara aktif dalam proses identifikasi kebutuhan, sehingga hasil yang diperoleh benar-benar merefleksikan realitas dan aspirasi masyarakat.

Keterlibatan komunitas dalam riset kebutuhan tidak hanya meningkatkan akurasi data, tetapi juga membangun rasa kepemilikan (*ownership*) dan kepercayaan (*trust*) antara peneliti, fasilitator, dan masyarakat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa intervensi yang dirancang nantinya dapat diterima dan didukung oleh komunitas (Nel, 2018). Selain itu, riset kebutuhan yang baik juga mempertimbangkan kelompok rentan atau marjinal, sehingga suara mereka tidak terabaikan dalam proses perencanaan (Mulroy, 2013).

Pemetaan aset adalah proses identifikasi, inventarisasi, dan analisis terhadap sumber daya, kekuatan, dan potensi yang dimiliki oleh komunitas. Pendekatan ini menekankan pada paradigma berbasis aset (*asset-based approach*), yang berbeda dengan pendekatan berbasis masalah (*deficit-based approach*) (Velonis et al., 2018). Pemetaan aset bertujuan untuk menemukan dan mengoptimalkan sumber daya yang sudah ada, baik yang bersifat *tangible* (fisik, seperti fasilitas kesehatan, sekolah, tempat ibadah, lahan produktif) maupun *intangible* (sosial, seperti jejaring sosial, nilai budaya, kepemimpinan lokal, pengetahuan tradisional) (Feuerherm & Oshio, 2020).

Metode pemetaan aset dapat dilakukan melalui survei, wawancara, observasi, diskusi kelompok, hingga teknik kreatif seperti *story mapping*, *photovoice*, atau penggunaan teknologi GIS (*Geographic Information System*) untuk memvisualisasikan distribusi aset di wilayah tertentu. Proses ini sebaiknya melibatkan partisipasi aktif masyarakat, sehingga mereka dapat mengidentifikasi sendiri aset yang dimiliki dan merasa menjadi bagian dari proses perubahan. Selain itu, pemetaan aset juga dapat mengungkap hubungan antar aset, sehingga strategi intervensi dapat dirancang secara sinergis dan saling memperkuat (Ammerman & Parks, 1998).

Integrasi antara riset kebutuhan dan pemetaan aset sangat penting dalam perencanaan program pengabdian masyarakat. Dengan memahami kebutuhan dan aset secara bersamaan, perancang program dapat merumuskan intervensi yang tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga memperkuat kapasitas lokal dan mendorong keberlanjutan (South et al., 2017). Pendekatan ini juga mendorong

perubahan paradigma dari “penerima bantuan” menjadi “agen perubahan”, di mana masyarakat diberdayakan untuk memimpin proses pembangunan berbasis kekuatan yang mereka miliki (Sharpe et al., 2000).

2. Fase 2 (Design)

Fase desain dalam program pengabdian masyarakat merupakan tahapan krusial yang menjembatani hasil riset kebutuhan dan pemetaan aset (fase assess) menuju implementasi nyata di lapangan. Pada fase ini, penyusunan modul dilakukan secara kolaboratif antara tim pelaksana (misalnya dosen, mahasiswa, atau fasilitator) dan perwakilan komunitas (Lee et al., 2022). Tujuan utamanya adalah menghasilkan modul yang kontekstual, relevan, dan dapat diterima serta diimplementasikan secara efektif oleh masyarakat sasaran. Proses ini menekankan prinsip partisipasi, pemberdayaan, dan co-creation, di mana komunitas tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek aktif dalam perancangan solusi.

Penyusunan modul bersama komunitas didasarkan pada pendekatan partisipatif dan co-design. Pendekatan ini menempatkan komunitas sebagai mitra sejajar, sehingga modul yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan, nilai, budaya, dan potensi lokal (Minoi et al., 2019). Kolaborasi ini juga mendorong terjadinya transfer pengetahuan dua arah: tim pelaksana membawa perspektif akademik dan metodologis, sementara komunitas memberikan wawasan kontekstual dan pengalaman nyata (Smith & Iversen, 2018). Dengan demikian, modul yang dihasilkan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis dan aplikatif.

Penyusunan modul secara kolaboratif memiliki sejumlah keunggulan. Pertama, meningkatkan relevansi dan keberterimaan modul di masyarakat karena berbasis pada kebutuhan dan konteks lokal (Greenhalgh et al., 2016). Kedua, memperkuat kapasitas komunitas dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program secara mandiri (Dollinger et al., 2020). Ketiga, membangun rasa kepemilikan (ownership) dan kepercayaan antara komunitas dan pihak eksternal, sehingga program lebih berkelanjutan. Keempat, proses ini juga menjadi sarana pembelajaran bersama, di mana terjadi pertukaran pengetahuan dan pengalaman yang memperkaya kedua belah pihak (Jordaan & Mennega, 2021).

3. Fase 3 (Implement)

Fase implementasi dalam program pengabdian masyarakat merupakan tahapan krusial yang menghubungkan perencanaan dengan aksi nyata di lapangan. Pada fase ini, pelatihan fasilitator dan pelaksanaan workshop modul menjadi inti dari strategi untuk memastikan transfer pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang telah dirancang bersama komunitas pada fase sebelumnya. Proses ini tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi juga pada penguatan kapasitas lokal, pembentukan jejaring, serta penciptaan lingkungan belajar yang partisipatif dan inklusif.

Pelatihan fasilitator merupakan langkah awal yang sangat penting dalam fase implementasi. Fasilitator, baik dari unsur masyarakat maupun eksternal, berperan sebagai agen perubahan yang menjembatani antara modul yang telah disusun dengan realitas komunitas. Model pelatihan yang efektif biasanya mengadopsi pendekatan Training-of-Trainers (ToT), di mana fasilitator tidak hanya dibekali dengan pengetahuan substansi modul, tetapi juga keterampilan fasilitasi, komunikasi, dan adaptasi terhadap dinamika kelompok (Patel et al., 2018). Pelatihan ini dirancang secara teoritis dan praktis, menggabungkan pembelajaran berbasis pengalaman, simulasi, diskusi kelompok, serta refleksi kritis terhadap tantangan yang mungkin dihadapi di lapangan.

Kualitas pelatihan sangat dipengaruhi oleh desain kurikulum, metode pembelajaran, serta dukungan mentoring dan supervisi berkelanjutan. Evaluasi pelatihan menunjukkan bahwa fasilitator yang mendapatkan pelatihan komprehensif cenderung lebih percaya diri, mampu beradaptasi dengan kebutuhan peserta, dan efektif dalam menyampaikan materi. Selain itu, pelatihan yang melibatkan fasilitator dari komunitas sendiri terbukti meningkatkan penerimaan dan keberlanjutan program, karena mereka lebih memahami konteks sosial-budaya setempat.

Setelah fasilitator siap, tahap berikutnya adalah pelaksanaan workshop modul di komunitas. Workshop ini dirancang sebagai ruang belajar yang interaktif, di mana peserta tidak hanya menerima materi secara pasif, tetapi juga terlibat aktif dalam diskusi, simulasi, studi kasus, dan praktik langsung. Fleksibilitas dalam penyampaian materi sangat penting, agar fasilitator dapat menyesuaikan urutan dan kedalaman pembahasan sesuai dinamika kelompok dan kebutuhan peserta. Penggunaan alat bantu visual, media digital, serta metode partisipatif seperti role play dan kerja kelompok dapat meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta (Berrian et al., 2017).

Workshop yang efektif juga menyediakan ruang refleksi, di mana peserta dapat berbagi pengalaman, mengidentifikasi tantangan, dan merumuskan solusi bersama. Proses ini memperkuat rasa kepemilikan (*ownership*) dan membangun jejaring antar peserta, sehingga dampak program dapat meluas dan berkelanjutan (Dumlao, 2022). Selain itu, workshop dapat menjadi ajang untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan lanjutan atau penyesuaian modul berdasarkan umpan balik peserta.

Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada sistem monitoring dan evaluasi yang terintegrasi. Fasilitator didorong untuk melakukan penilaian diri (*self-assessment*) terhadap pelaksanaan workshop, tingkat keterlibatan peserta, serta pencapaian tujuan pembelajaran (McPherson et al., 2020). Evaluasi ini dapat dilakukan melalui observasi, kuesioner, wawancara, atau diskusi kelompok terfokus. Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan berkelanjutan, baik dalam aspek teknis pelaksanaan maupun pengembangan kapasitas fasilitator (Taliep et al., 2020).

Dukungan pasca-pelatihan, seperti mentoring, supervisi, dan akses ke sumber daya pembelajaran tambahan, sangat penting untuk menjaga motivasi dan kualitas fasilitator (Narine et al., 2021). Model pendampingan berkelanjutan terbukti efektif dalam meningkatkan kompetensi fasilitator dan memastikan keberlanjutan program.

4. Fase 4 (Evaluate & Sustain)

Fase keempat dalam program pengabdian masyarakat, yaitu Evaluate & Sustain, merupakan tahapan yang sangat penting untuk memastikan bahwa intervensi yang telah dilakukan benar-benar memberikan dampak positif dan dapat berlanjut secara mandiri di komunitas. Evaluasi dampak dan perencanaan keberlanjutan tidak hanya menjadi alat ukur keberhasilan program, tetapi juga menjadi fondasi untuk pengembangan, replikasi, dan adaptasi program di masa depan. Tahapan ini menuntut pendekatan yang sistematis, partisipatif, dan berbasis data, agar hasil yang diperoleh tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif dan transformatif bagi masyarakat.

Evaluasi dampak dalam pengabdian masyarakat bertujuan untuk menilai sejauh mana program telah mencapai tujuan yang ditetapkan, baik dari sisi output, outcome, maupun dampak jangka panjang. Evaluasi yang efektif harus mengintegrasikan indikator kuantitatif dan kualitatif, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk anggota komunitas, pelaksana program, dan mitra eksternal. Salah satu pendekatan yang banyak digunakan adalah pengembangan indikator keberlanjutan yang holistik, mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan

lingkungan (Marta & Giulia, 2020). Indikator-indikator ini dapat diidentifikasi melalui proses partisipatif, seperti survei, diskusi kelompok terfokus, dan wawancara mendalam, sehingga benar-benar merefleksikan kebutuhan dan harapan komunitas.

Metode evaluasi yang komprehensif juga mencakup penggunaan kerangka kerja seperti RE-AIM (Reach, Effectiveness, Adoption, Implementation, Maintenance) untuk menilai jangkauan, efektivitas, adopsi, implementasi, dan keberlanjutan program. Selain itu, pendekatan multi-kriteria seperti Social Multi-Criteria Evaluation (SMCE) dan Community Impact Evaluation (CIE) dapat digunakan untuk menilai dampak sosial dan teknis secara bersamaan, serta memediasi preferensi berbagai pemangku kepentingan (Haldane et al., 2019). Evaluasi dampak juga harus memperhatikan aspek empowerment, yaitu sejauh mana program meningkatkan kapasitas, partisipasi, dan kemandirian komunitas.

Hasil evaluasi dampak tidak hanya digunakan untuk menilai keberhasilan, tetapi juga sebagai dasar pembelajaran dan perbaikan program. Proses ini mendorong refleksi kritis, identifikasi praktik baik, serta pengembangan strategi adaptasi terhadap tantangan yang muncul di lapangan. Evaluasi yang berkelanjutan juga memungkinkan program untuk tetap relevan dan responsif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan yang terus berubah.

D. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Dalam pelaksanaan metode pengabdian masyarakat, teknik pengumpulan dan analisis data kualitatif menjadi fondasi penting untuk memahami dinamika, kebutuhan, serta dampak program di tingkat komunitas. Empat teknik utama yang sering digunakan adalah observasi partisipan, Focus Group Discussion (FGD), wawancara mendalam, dan analisis tematik. Keempat teknik ini saling melengkapi untuk menghasilkan gambaran yang komprehensif, mendalam, dan kontekstual mengenai realitas sosial di masyarakat.

Observasi partisipan adalah teknik di mana peneliti terlibat langsung dalam aktivitas komunitas, baik sebagai pengamat maupun sebagai bagian dari kelompok yang diamati. Melalui observasi partisipan, peneliti dapat menangkap perilaku, interaksi, dan makna yang tidak selalu terungkap melalui wawancara atau survei (Daley et al., 2010). Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memahami konteks sosial secara lebih mendalam, mengidentifikasi pola-pola interaksi, serta memperoleh data yang lebih otentik dan naturalistik (Seim, 2021). Dalam praktiknya, observasi partisipan dapat dilakukan dengan berbagai tingkat keterlibatan, mulai dari complete

observer hingga complete participant, tergantung pada tujuan penelitian dan etika yang berlaku (Israel et al., 2005). Keunggulan utama teknik ini adalah kemampuannya untuk menangkap nuansa dan dinamika yang sulit diakses melalui metode lain, meskipun peneliti harus selalu waspada terhadap potensi bias dan reflektivitas diri (Inoue et al., 2021a).

FGD merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan diskusi terarah dalam kelompok kecil, biasanya terdiri dari 6-12 peserta yang memiliki karakteristik atau pengalaman serupa terkait topik yang dibahas. FGD sangat efektif untuk menggali persepsi, pendapat, pengalaman, dan harapan komunitas secara kolektif, serta untuk mengidentifikasi isu-isu yang relevan dan prioritas bersama (Riwukore, 2022). Dalam konteks pengabdian masyarakat, FGD sering digunakan untuk merumuskan masalah, merancang intervensi, mengevaluasi program, dan mengidentifikasi solusi berbasis komunitas. Keberhasilan FGD sangat dipengaruhi oleh keterampilan moderator dalam memfasilitasi diskusi, menjaga dinamika kelompok, dan memastikan semua suara terdengar. Selain itu, FGD juga dapat digunakan sebagai sarana edukasi dan pemberdayaan, karena peserta didorong untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman.

Wawancara mendalam adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara tatap muka antara peneliti dan informan, dengan tujuan menggali informasi secara detail, personal, dan kontekstual (Nurlaiva & Sumarsono, 2018). Wawancara ini bersifat semi-terstruktur atau terbuka, sehingga memungkinkan fleksibilitas dalam eksplorasi topik dan penyesuaian pertanyaan sesuai respons informan. Dalam pengabdian masyarakat, wawancara mendalam sangat berguna untuk memahami motivasi, pengalaman, hambatan, dan harapan individu terkait program yang dijalankan. Teknik ini juga efektif untuk menggali perspektif kelompok marginal atau suara-suara yang kurang terwakili dalam diskusi kelompok. Validitas data dapat ditingkatkan melalui triangulasi dengan teknik lain, seperti observasi dan FGD.

Analisis tematik adalah metode analisis data kualitatif yang bertujuan mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola-pola (tema) yang muncul dari data (Inoue et al., 2021b). Proses analisis tematik umumnya meliputi beberapa tahap: (1) familiarisasi dengan data melalui pembacaan berulang, (2) pengkodean data secara sistematis, (3) pencarian tema-tema utama, (4) peninjauan dan pemurnian tema, (5) penamaan dan definisi tema, serta (6) penyusunan laporan hasil analisis. Analisis tematik sangat fleksibel dan dapat diterapkan pada berbagai jenis data kualitatif, seperti transkrip wawancara, catatan observasi, dan hasil FGD. Keunggulan analisis tematik adalah kemampuannya untuk mengorganisasi data yang kompleks

menjadi tema-tema yang bermakna dan mudah dipahami, serta untuk menghubungkan temuan dengan tujuan penelitian dan konteks komunitas. Dalam pengabdian masyarakat, analisis tematik membantu peneliti dan pelaksana program untuk memahami kebutuhan, potensi, dan tantangan komunitas secara lebih terstruktur dan sistematis.

Hasil

A. Hasil Fase 1

Identifikasi kebutuhan komunitas dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui survei rumah tangga, wawancara dengan tokoh masyarakat, FGD dengan kelompok rentan, serta observasi langsung di lapangan. Data sekunder meliputi dokumen desa, laporan kesehatan, dan data statistik lokal. Kebutuhan yang sering muncul meliputi akses layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar, lapangan kerja, dan keamanan lingkungan. Selain itu, kebutuhan spesifik seperti pelatihan keterampilan, literasi digital, dan layanan kesehatan mental juga sering diidentifikasi, tergantung pada karakteristik komunitas.

Di sisi lain, pemetaan potensi komunitas menyoroti aset fisik (lahan, fasilitas umum), aset manusia (keterampilan warga, tokoh lokal), aset sosial (jejaring sosial, kelompok swadaya), dan aset institusional (organisasi lokal, LSM, pemerintah desa). Pendekatan asset-based community development (ABCD) menekankan pentingnya mengidentifikasi dan mengoptimalkan kekuatan lokal sebagai modal utama pembangunan. Proses ini dilakukan secara partisipatif agar warga merasa memiliki dan berdaya dalam setiap tahapan program.

Table 1. Profil Kebutuhan dan Potensi Komunitas

Aspek	Kebutuhan Utama	Potensi/Aset Komunitas
Kesehatan	Akses layanan kesehatan dasar, penyuluhan gizi, layanan kesehatan ibu & anak	Puskesmas, kader posyandu, relawan kesehatan, program imunisasi rutin

Pendidikan	Fasilitas belajar, pelatihan guru, literasi digital, beasiswa anak tidak mampu	SD & SMP, kelompok belajar, guru berpengalaman, perpustakaan desa
Ekonomi	Pelatihan keterampilan, akses modal usaha, pemasaran produk lokal	Kelompok tani, UMKM, koperasi desa, lahan pertanian produktif
Infrastruktur	Jalan desa, air bersih, sanitasi, listrik stabil	Gotong royong warga, alat berat milik desa, jaringan listrik PLN
Sosial & Budaya	Ruang pertemuan, pelestarian budaya lokal, penguatan organisasi pemuda	Balai desa, sanggar seni, kelompok pemuda, tokoh adat
Lingkungan	Pengelolaan sampah, penghijauan, mitigasi bencana	Bank sampah, kelompok tani hutan, relawan lingkungan
Kesehatan Mental	Konseling, edukasi kesehatan jiwa, ruang aman untuk remaja	Kader kesehatan jiwa, kelompok remaja, dukungan tokoh agama
Keamanan	Penerangan jalan, pos ronda, edukasi anti-narkoba	Linmas, karang taruna, pos kamling, kerjasama dengan Polsek

Hasil pemetaan kebutuhan dan potensi komunitas menunjukkan bahwa setiap komunitas memiliki tantangan dan kekuatan yang unik. Misalnya, kebutuhan akan akses kesehatan dan pendidikan seringkali menjadi prioritas utama, namun di sisi lain komunitas juga memiliki aset seperti kader kesehatan, kelompok belajar, dan jejaring sosial yang kuat. Pendekatan partisipatif dalam pemetaan ini terbukti meningkatkan rasa kepemilikan warga terhadap program, memperkuat kolaborasi lintas sektor, dan mendorong solusi berbasis kekuatan lokal.

Studi-studi menunjukkan bahwa hasil fase 1 ini sangat menentukan keberhasilan intervensi berikutnya. Laporan kebutuhan dan potensi komunitas menjadi acuan dalam merancang program yang kontekstual, menghindari pendekatan top-down, serta memastikan keberlanjutan program. Selain itu, hasil pemetaan juga dapat digunakan untuk advokasi kebijakan, penggalangan dana, dan membangun kemitraan dengan berbagai pihak.

B. Hasil Fase 2

Struktur modul disusun secara sistematis agar mudah dipahami dan diimplementasikan oleh berbagai kalangan, baik pendidik, fasilitator, maupun anggota komunitas. Modul ini terdiri dari beberapa bagian utama: (1) Pendahuluan, (2) Landasan Teoritis dan Konseptual, (3) Tema-tema Utama Tafsir Sosial, (4) Metode Partisipatif, (5) Studi Kasus dan Praktik, (6) Evaluasi dan Refleksi, serta (7) Daftar

Pustaka dan Lampiran. Setiap bagian dirancang untuk saling melengkapi, dengan penekanan pada relevansi sosial dan keterlibatan aktif peserta.

Tema yang diangkat dalam modul "Tafsir Sosial" dipilih berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan komunitas dan isu-isu aktual yang relevan dengan kehidupan masyarakat. Tema-tema tersebut antara lain: (1) Keadilan Sosial dalam Al-Qur'an, (2) Toleransi dan Multikulturalisme, (3) Anti-Radikalisme dan Deradikalisasi, (4) Solidaritas dan Kepedulian Sosial, (5) Lingkungan dan Tanggung Jawab Sosial, (6) Peran Perempuan dalam Masyarakat, dan (7) Dialog Antaragama. Setiap tema dikembangkan dengan pendekatan interdisipliner, mengintegrasikan tafsir ayat-ayat Al-Qur'an dengan teori sosial, pengalaman lokal, dan praktik kehidupan sehari-hari.

Pengembangan dan implementasi modul "Tafsir Sosial" menggunakan metode partisipatif, di mana anggota komunitas dilibatkan secara aktif dalam setiap tahapan, mulai dari perumusan tema, penyusunan materi, hingga evaluasi hasil pembelajaran. Metode yang digunakan meliputi diskusi kelompok terarah (FGD), studi kasus, simulasi, role play, observasi lapangan, dan refleksi bersama. Pendekatan ini sejalan dengan model pembelajaran interreligious literacy yang menekankan pentingnya pengalaman langsung, dialog, dan kolaborasi lintas kelompok. Selain itu, metode partisipatif juga mendorong terjadinya transformasi sosial, di mana peserta tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek perubahan.

C. Hasil Fase 3

Pelatihan dilaksanakan secara terstruktur melalui beberapa tahapan: pembukaan, pemaparan materi, diskusi interaktif, simulasi, praktik lapangan, refleksi, dan evaluasi. Fasilitator menggunakan metode partisipatif seperti diskusi kelompok, studi kasus, role play, mentoring, dan peer teaching untuk memastikan keterlibatan aktif peserta. Dinamika pelatihan sangat dipengaruhi oleh latar belakang peserta, kesiapan fasilitator, serta fleksibilitas dalam menyesuaikan materi dengan kebutuhan lokal.

Selama pelatihan, terjadi interaksi yang intens antara peserta dan fasilitator. Peserta didorong untuk berbagi pengalaman, mengemukakan pendapat, dan memecahkan masalah secara kolaboratif. Proses ini membangun rasa percaya diri, solidaritas, dan kepemilikan terhadap program. Tantangan yang muncul antara lain perbedaan tingkat pemahaman, keterbatasan waktu, dan kendala teknis, namun dapat diatasi melalui adaptasi metode dan pendampingan intensif

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan kuesioner, respons peserta terhadap pelatihan sangat positif. Sebagian besar peserta menyatakan materi pelatihan relevan dengan kebutuhan mereka, metode partisipatif memudahkan pemahaman, dan suasana pelatihan mendorong keterbukaan serta kolaborasi. Berikut adalah contoh data fiktif respons peserta:

Table 2. Data Peserta Sebelum dan Sesudah Pelatihan

Aspek yang Dinilai	Sebelum Pelatihan (%)	Setelah Pelatihan (%)	Catatan Respons Peserta
Pemahaman Materi	35	88	"Materi mudah dipahami, banyak contoh nyata."
Kepercayaan Diri	40	85	"Saya lebih percaya diri mempraktikkan pengetahuan baru."
Keterlibatan Diskusi	25	90	"Diskusi kelompok sangat membantu memahami masalah."
Kemampuan Praktis	30	82	"Simulasi dan praktik lapangan sangat bermanfaat."
Kepuasan terhadap Fasilitator	60	95	"Fasilitator ramah, sabar, dan komunikatif."
Rasa Solidaritas	50	92	"Saya merasa lebih dekat dan kompak dengan peserta lain."
Rencana Tindak Lanjut	20	80	"Saya ingin menerapkan hasil pelatihan di lingkungan saya."

Dinamika pelatihan menunjukkan adanya transformasi signifikan pada peserta, baik dari sisi pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Peserta yang awalnya pasif menjadi lebih aktif, berani bertanya, dan mampu bekerja sama lintas kelompok. Proses refleksi dan evaluasi partisipatif memperkuat komitmen peserta untuk menerapkan hasil pelatihan di komunitas masing-masing. Studi-studi menunjukkan bahwa pelatihan berbasis partisipasi dan pengalaman langsung lebih efektif dalam membangun kapasitas dan perubahan perilaku berkelanjutan.

Selain peningkatan individu, pelatihan juga memperkuat jejaring sosial, solidaritas, dan kolaborasi antar peserta. Beberapa peserta bahkan berinisiatif

membentuk kelompok belajar mandiri dan merancang program tindak lanjut di komunitasnya. Tantangan yang dihadapi, seperti perbedaan latar belakang dan keterbatasan fasilitas, dapat diatasi melalui adaptasi metode, pendampingan, dan penguatan motivasi intrinsik peserta.

D. Hasil Fase 4

1. Dampak Kognitif

Setelah pelaksanaan program pelatihan dan pendampingan, terjadi peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan. Berdasarkan data fiktif hasil pre-test dan post-test, skor rata-rata pemahaman peserta meningkat dari 55 menjadi 88 (skala 0-100). Peserta melaporkan bahwa materi yang disampaikan mudah dipahami, relevan dengan kebutuhan mereka, dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Peningkatan ini sejalan dengan temuan berbagai studi yang menunjukkan bahwa pelatihan berbasis pengalaman dan partisipatif secara efektif meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta. Misalnya, pelatihan berbasis skenario dan peer-training terbukti meningkatkan skor pengetahuan dan literasi kesehatan secara signifikan. Selain itu, peserta juga mampu mengidentifikasi isu-isu kunci di komunitas, memahami faktor-faktor sosial yang mempengaruhi perilaku, serta mengembangkan solusi berbasis pengetahuan yang diperoleh.

2. Dampak Afektif

Dampak afektif tercermin dari perubahan sikap peserta terhadap isu sosial dan peningkatan kepercayaan diri dalam berpartisipasi aktif di komunitas. Berdasarkan survei fiktif, 92% peserta menyatakan sikap mereka terhadap pentingnya kolaborasi dan kepedulian sosial meningkat setelah mengikuti program. Kepercayaan diri peserta dalam menyampaikan pendapat, memimpin diskusi, dan mengambil inisiatif juga meningkat dari skor rata-rata 60 menjadi 90 (skala 0-100). Studi-studi menunjukkan bahwa pelatihan yang menekankan refleksi, dialog, dan pengalaman langsung dapat membentuk sikap positif, empati, serta rasa tanggung jawab sosial. Peserta juga melaporkan merasa lebih dihargai, termotivasi, dan memiliki rasa kepemilikan terhadap perubahan di komunitas. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa peningkatan self-efficacy dan sikap prososial merupakan indikator penting keberhasilan program pengabdian masyarakat.

3. Dampak Behavioral

Dampak behavioral terlihat dari berbagai aksi nyata yang diinisiasi oleh komunitas pasca intervensi. Berdasarkan data fiktif, 80% peserta terlibat dalam minimal satu aksi sosial, seperti membentuk kelompok belajar, mengadakan kampanye kesehatan, atau melakukan advokasi isu lingkungan. Beberapa contoh aksi nyata yang dilakukan komunitas antara lain: (1) pembentukan kelompok relawan untuk edukasi kesehatan, (2) pelaksanaan program bank sampah berbasis komunitas, (3) penyelenggaraan forum dialog antarwarga untuk menyelesaikan konflik sosial, dan (4) pengembangan program literasi digital untuk anak-anak. Studi menunjukkan bahwa keberhasilan program pengabdian masyarakat diukur dari sejauh mana peserta mampu menginisiasi dan mempertahankan aksi kolektif yang berdampak pada perubahan sosial. Intervensi yang efektif tidak hanya meningkatkan niat, tetapi juga mendorong terjadinya perubahan perilaku nyata dan pembentukan kebiasaan baru di komunitas.

E. Diskusi Integratif

Keberhasilan utama penerapan manajemen riset dakwah tercermin dari beberapa aspek. Pertama, integrasi fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi) secara sistematis mampu meningkatkan efektivitas program dakwah di berbagai komunitas, baik di lingkungan panti asuhan, masjid, maupun organisasi masyarakat. Perencanaan matang berbasis kebutuhan komunitas menghasilkan program yang relevan, seperti pelatihan kader dakwah, penguatan literasi keagamaan, dan pemberdayaan ekonomi berbasis dakwah. Penggunaan teknologi digital dan media sosial juga memperluas jangkauan dakwah, meningkatkan partisipasi generasi muda, serta memperkuat citra profesionalisme lembaga dakwah.

Kedua, kolaborasi lintas sektor—antara pengurus, tokoh agama, pemerintah, dan komunitas—mendorong sinergi dan inovasi dalam pelaksanaan program. Contoh keberhasilan nyata adalah terbentuknya kelompok relawan dakwah, peningkatan pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian, serta penguatan solidaritas sosial melalui program charity dan advokasi isu-isu keumatan. Data fiktif menunjukkan 85% peserta program merasa lebih paham dan percaya diri dalam berdakwah, 78% terlibat aktif dalam aksi sosial, dan 90% menilai program dakwah berbasis riset lebih relevan dengan kebutuhan mereka.

Meski banyak keberhasilan, tantangan signifikan tetap dihadapi. Tantangan internal meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, kurangnya pelatihan manajemen modern, serta resistensi terhadap inovasi, khususnya dalam

adopsi teknologi digital. Tantangan eksternal berupa dinamika sosial-budaya, keterbatasan dana, dan kurangnya dukungan infrastruktur juga menjadi hambatan utama. Koordinasi antar lembaga dakwah seringkali belum optimal, sehingga terjadi tumpang tindih program dan kurangnya monitoring serta evaluasi berkelanjutan.

Selain itu, dalam konteks masyarakat multikultural, tantangan komunikasi inklusif dan adaptasi pesan dakwah menjadi sangat penting. Penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan dakwah di masyarakat majemuk sangat dipengaruhi oleh empati budaya, kolaborasi lintas komunitas, dan pemanfaatan data untuk merancang program yang kontekstual. Data fiktif mengindikasikan hanya 60% peserta yang merasa pesan dakwah benar-benar sesuai dengan konteks lokal, dan 40% mengeluhkan kurangnya ruang dialog lintas budaya.

Posisi pengabdian dalam manajemen riset dakwah sangat strategis namun penuh tantangan. Pengabdian berperan sebagai fasilitator, inovator, sekaligus mediator antara kepentingan akademik, kebutuhan masyarakat, dan dinamika organisasi. Refleksi kritis menunjukkan bahwa pengabdian harus mampu menyeimbangkan peran sebagai peneliti, pendidik, dan agen perubahan sosial. Pengalaman di lapangan menuntut fleksibilitas, sensitivitas budaya, dan kemampuan membangun kepercayaan dengan berbagai pemangku kepentingan.

Pengabdian juga harus siap menghadapi dilema etis, seperti menjaga objektivitas riset di tengah tekanan normatif komunitas, serta mengelola ekspektasi antara hasil jangka pendek dan dampak jangka panjang. Data fiktif menunjukkan 70% pengabdian merasa perlu pelatihan lanjutan dalam komunikasi lintas budaya dan manajemen konflik, sementara 65% mengakui pentingnya refleksi diri untuk menjaga integritas dan relevansi program.

Secara teoretis, temuan ini memperkaya khazanah manajemen dakwah dengan menegaskan pentingnya pendekatan partisipatif, kolaboratif, dan berbasis data dalam merancang dan mengimplementasikan program dakwah. Model manajemen riset dakwah yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan lokal terbukti lebih efektif dalam membangun kapasitas komunitas dan mendorong perubahan sosial berkelanjutan.

Secara praktis, pengabdian masyarakat berbasis manajemen riset dakwah dapat direplikasi dengan beberapa catatan: (1) perlunya pelatihan manajemen modern bagi pengurus dakwah, (2) penguatan jejaring kolaborasi lintas sektor, (3) pengembangan sistem monitoring dan evaluasi partisipatif, serta (4) adaptasi pesan dakwah sesuai konteks sosial-budaya. Penggunaan teknologi digital dan media sosial

juga harus dioptimalkan untuk menjangkau generasi muda dan memperluas dampak dakwah.

Kesimpulan

Aplikasi manajemen riset dakwah dalam penyusunan modul "Tafsir Sosial" berperan penting dalam memberdayakan komunitas marginal di perkotaan dengan mengintegrasikan pendekatan kontekstual dan humanistik yang relevan dengan dinamika sosial masyarakat urban. Melalui pengelolaan riset yang sistematis, modul ini dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan dan tantangan komunitas marginal, sehingga tafsir sosial yang disajikan tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga aplikatif dalam kehidupan sehari-hari, mendorong pemahaman agama yang moderat, inklusif, dan solutif. Pendekatan ini sejalan dengan tren pembelajaran agama yang bergeser dari doktrinal ke humanistik-fungsional, seperti yang diterapkan dalam model pembelajaran literasi antaragama di perguruan tinggi Islam di Indonesia, yang efektif mengurangi radikalisme dan meningkatkan toleransi sosial.

Selain itu, pendidikan ulama yang terstruktur dan berorientasi pada kompetensi profesional, sosial, dan spiritual juga mendukung keberhasilan dakwah dalam memberdayakan masyarakat, dengan strategi pelatihan yang melibatkan praktik langsung di komunitas serta penguatan kapasitas keagamaan yang responsif terhadap kebutuhan sosial. Implementasi tafsir sosial yang berbasis riset ini juga mengadopsi nilai-nilai moderasi dan keterbukaan yang tercermin dalam gerakan Islam berkemajuan, seperti yang dilakukan oleh Muhammadiyah, yang menekankan pemberdayaan masyarakat melalui penguatan organisasi, pembinaan spiritual, dan pengembangan amal usaha sosial-ekonomi. Dengan demikian, aplikasi manajemen riset dakwah dalam penyusunan modul "Tafsir Sosial" tidak hanya memperkaya pemahaman keagamaan komunitas marginal, tetapi juga memperkuat kohesi sosial dan kapasitas mereka untuk berkontribusi secara positif dalam kehidupan perkotaan yang kompleks dan beragam.

Daftar Referensi

Ammerman, A., & Parks, C. (1998). Preparing Students for More Effective Community Interventions: Assets Assessment. *Family & Community Health*, 21, 32–45. <https://doi.org/10.1097/00003727-199804000-00006>

- Basri, B. (2016). *Fenomena Dakwah Radikal*. 7, 23–40. <https://doi.org/10.32923/maw.v7i1.565>
- Benjamin-Thomas, T., Corrado, A., McGrath, C., Rudman, D., & Hand, C. (2018). Working Towards the Promise of Participatory Action Research: Learning From Ageing Research Exemplars. *International Journal of Qualitative Methods*, 17. <https://doi.org/10.1177/1609406918817953>
- Berrian, A., Smith, M., Van Rooyen, J., Martínez-López, B., Plank, M., Smith, W., & Conrad, P. (2017). A community-based One Health education program for disease risk mitigation at the human-animal interface. *One Health*, 5, 9–20. <https://doi.org/10.1016/j.onehlt.2017.11.002>
- Bevilacqua, C., Pizzimenti, P., Hamdy, N., & Mangiulli, F. (2022). From Deinstitutionalization to Community-Based Urban Development: Investigating Accessibility of Urban Systems in Calabria through Network Analytics. *Sustainability*. <https://doi.org/10.3390/su14031348>
- Chevalier, J., & Buckles, D. (2019). *Participatory Action Research*. <https://doi.org/10.4324/9781351033268>
- Claes, E., Schrooten, M., McLaughlin, H., & Csoba, J. (2021). Community service learning in complex urban settings: challenges and opportunities for social work education. *Social Work Education*, 41, 1272–1290. <https://doi.org/10.1080/02615479.2021.1948003>
- Cusack, C., Cohen, B., Mignone, J., Chartier, M., & Lutfiyya, Z. (2018). Participatory action as a research method with public health nurses. *Journal of Advanced Nursing*, 74, 1544. <https://doi.org/10.1111/jan.13555>
- Daley, C. M., James, A., Ulrey, E., Joseph, S., Talawyma, A., Choi, W., Greiner, K., & Coe, M. (2010). Using Focus Groups in Community-Based Participatory Research: Challenges and Resolutions. *Qualitative Health Research*, 20, 697–706. <https://doi.org/10.1177/1049732310361468>
- Díaz-Arévalo, J. M. (2022). In search of the ontology of participation in Participatory Action Research: Orlando Fals-Borda’s Participatory Turn, 1977–1980. *Action Research*, 20, 343–362. <https://doi.org/10.1177/14767503221103571>
- Dollinger, M., D’Angelo, B., Naylor, R., Harvey, A., & Mahat, M. (2020). Participatory design for community-based research: a study on regional student higher education pathways. *The Australian Educational Researcher*, 48, 739–755. <https://doi.org/10.1007/s13384-020-00417-5>

- Dumlao, R. (2022). Collaborating Successfully with Community Partners and Clients in Online Service-Learning Classes. *Journal of Technical Writing and Communication*, 53, 218–239. <https://doi.org/10.1177/00472816221088349>
- Fahmi, Moh. I., & Attatmimi, A. H. (2022). Manajemen Pelatihan Dakwah Untuk Meningkatkan Kualitas Dakwah Sholawat Wahidiyah Di Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Sholawat Wahidiyah Ngoro Jombang Tahun 2022. *Ats-Tsaqofi: Jurnal Pendidikan Dan Manajemen Islam*. <https://doi.org/10.61181/ats-tsaqofi.v4i2.175>
- Feuerherm, E., & Oshio, T. (2020). Conducting a Community-Based ESOL Programme Needs Analysis. *Elt Journal*, 74, 327–337. <https://doi.org/10.1093/elt/ccaa011>
- Gomes, S., Hermans, L., & Thissen, W. (2017). Extending community operational research to address institutional aspects of societal problems: Experiences from peri-urban Bangladesh. *Eur. J. Oper. Res.*, 268, 904–917. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2017.11.007>
- Govigli, M., Alkhaled, S., Arnesen, T., Barlagne, C., Bjerck, M., Burlando, C., Melnykovich, M., Fernández-Blanco, C. R., Sfeir, P., & Górriz-Mifsud, E. (2020). Testing a Framework to Co-Construct Social Innovation Actions: Insights from Seven Marginalized Rural Areas. *Sustainability*. <https://doi.org/10.3390/su12041441>
- Greenhalgh, T., Jackson, C., Shaw, S., & Janamian, T. (2016). Achieving Research Impact Through Co-creation in Community-Based Health Services: Literature Review and Case Study. *The Milbank Quarterly*, 94, 392–429. <https://doi.org/10.1111/1468-0009.12197>
- Haldane, V., Chuah, F., Srivastava, A., Singh, S., Koh, G., Seng, C., & Legido-Quigley, H. (2019). Community participation in health services development, implementation, and evaluation: A systematic review of empowerment, health, community, and process outcomes. *PLoS ONE*, 14. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0216112>
- Inoue, K., Son, D., Iida, J., & Taniguchi, S. (2021a). Fieldwork as a bridge between lectures and clinical clerkship: Medical students become the observer-as-participant. *Journal of General and Family Medicine*, 23, 65–66. <https://doi.org/10.1002/jgf2.468>
- Inoue, K., Son, D., Iida, J., & Taniguchi, S. (2021b). Fieldwork as a bridge between lectures and clinical clerkship: Medical students become the observer-as-participant. *Journal of General and Family Medicine*, 23, 65–66. <https://doi.org/10.1002/jgf2.468>

- Israel, B., Eng, E., Schulz, A., & Parker, E. (2005). *Methods in Community-Based Participatory Research for Health*. <https://consensus.app/papers/methods-in-communitybased-participatory-research-for-israel-eng/628da4ba96cf5eaea4c2859126e3ad30/>
- Jalaludin, A., Ulfiah, U., Mudrikah, A., & Noval, S. R. (2021). Strategy Management of Dakwah Education in the Era of the Industrial Revolution 4.0. *Journal of Social Science*. <https://doi.org/10.46799/jss.v2i6.248>
- Jordaan, M., & Mennega, N. (2021). Community partners' experiences of higher education service-learning in a community engagement module. *Journal of Applied Research in Higher Education*. <https://doi.org/10.1108/jarhe-09-2020-0327>
- Kidd, S., & Kral, M. (2005). Practicing participatory action research. *Journal of Counseling Psychology*, 52, 187–195. <https://doi.org/10.1037/0022-0167.52.2.187>
- Lee, K. J., Kim, Y., Roldan, W., Lee, J. H., & Yip, J. (2022). Caring for the community: An academically based community service course in LIS. *Journal of Librarianship and Information Science*, 55, 232–245. <https://doi.org/10.1177/09610006221132276>
- Lenette, C. (2022). *Participatory Action Research*. <https://doi.org/10.4135/9781412950589.n693>
- Lubis, Z. (2020). DAKWAH MANAGEMENT OF COMMUNITY DEVELOPMENT. *Spektra: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*. <https://doi.org/10.34005/spektra.v2i1.1535>
- Mahajan, S., Hausladen, C., Sánchez-Vaquerizo, J. A., Korecki, M., & Helbing, D. (2022). Participatory resilience: Surviving, recovering and improving together. *Sustainable Cities and Society*. <https://doi.org/10.1016/j.scs.2022.103942>
- Marta, B., & Giulia, D. (2020). Addressing Social Sustainability in Urban Regeneration Processes. An Application of the Social Multi-Criteria Evaluation. *Sustainability*. <https://doi.org/10.3390/su12187579>
- Maulana, L. (2018). Pembacaan Tafsir Feminis Nasarudin Umar Sebagai Tranformasi Sosial Islam. *Muwazah*. <https://doi.org/10.28918/muwazah.v9i1.1117>
- McPherson, M., Friesner, D., & Bozman, C. (2020). Mapping the interrelationships between community assets. *International Journal of Social Economics*. <https://doi.org/10.1108/ijse-04-2020-0206>
- Minoi, J.-L., Mohamad, F., Arnab, S., Phoa, J., Morini, L., Beaufoy, J., Lim, T., & Clarke, S. (2019). A Participatory Co-creation Model to Drive Community Engagement in Rural Indigenous Schools: A Case Study in Sarawak. *Electronic Journal of E-Learning*. <https://doi.org/10.34190/jel.17.3.001>

- Mitlin, D. (2018). Beyond contention: urban social movements and their multiple approaches to secure transformation. *Environment & Urbanization*, 30, 557–574. <https://doi.org/10.1177/0956247818791012>
- Mulroy, E. (2013). *Community Needs Assessment*. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780199975839.013.73>
- Muttaqin, J. (2021). The Digital Da'wah Movement: A Phenomenological Question of Urban Sufism Women. *Tashwirul Afkar*. <https://doi.org/10.51716/ta.v40i2.40>
- Narine, L., Ali, A., & Hill, P. (2021). Assessing Rural and Urban Community Assets and Needs to Inform Extension Program Planning. *Journal of Human Sciences and Extension*. <https://doi.org/10.54718/yyuc3011>
- Nel, H. (2018). A Comparison between the Asset-oriented and Needs-based Community Development Approaches in Terms of Systems Changes. *Practice*, 30, 33–52. <https://doi.org/10.1080/09503153.2017.1360474>
- Nurlaiva, C., & Sumarsono, R. (2018). *Community Participants in Managing Education Programs in Vocational School*. <https://doi.org/10.2991/coema-18.2018.51>
- Ozano, K., Dean, L., Adekeye, O., Bettee, A., Dixon, R., Gideon, N. U., Gwani, N., Isiyaku, S., Kollie, K., Lar, L., Oluwole, A., Piotrowski, H., Siakeh, A., Thomson, R., Yashiyi, J., Zawolo, G., & Theobald, S. (2020). Guiding principles for quality, ethical standards and ongoing learning in implementation research: multicountry learnings from participatory action research to strengthen health systems. *Health Policy and Planning*, 35. <https://doi.org/10.1093/heapol/czaa123>
- Parker, M., Wallerstein, N., Duran, B., Magarati, M., Burgess, E., Sanchez-Youngman, S., Boursaw, B., Heffernan, A., Garoutte, J., & Koegel, P. (2020). Engage for Equity: Development of Community-Based Participatory Research Tools. *Health Education & Behavior*, 47, 359–371. <https://doi.org/10.1177/1090198120921188>
- Patel, S., Margolies, P., Covell, N., Lipscomb, C., & Dixon, L. (2018). Using Instructional Design, Analyze, Design, Develop, Implement, and Evaluate, to Develop e-Learning Modules to Disseminate Supported Employment for Community Behavioral Health Treatment Programs in New York State. *Frontiers in Public Health*, 6. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2018.00113>
- Permatasari, W. (2022). Strategi Dakwah Karimah Remaja Masjid Raya Mujahidin Pontianak. *J-MD: Jurnal Manajemen Dakwah*. <https://doi.org/10.24260/j-md.v3i2.1000>
- Ramdhani, R. (2018). Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Agama. *Jurnal Ilmiah Syi'ar*. <https://doi.org/10.29300/syr.v18i2.1676>

- Reinganum, J. (1985). A two-stage model of research and development with endogenous second-mover advantages. *International Journal of Industrial Organization*, 3, 275–292. [https://doi.org/10.1016/0167-7187\(85\)90024-4](https://doi.org/10.1016/0167-7187(85)90024-4)
- Riwukore, J. R. (2022). Edukasi Kompleksitas dan Permasalahan Perasuransian di Propinsi Nusa Tenggara Timur. *Batara Wisnu : Indonesian Journal of Community Services*. <https://doi.org/10.53363/bw.v2i1.140>
- Rofiq, A. (2020). *URGENSI DAKWAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI ERA INDUSTRY 4.0*. 3, 1–21. <https://doi.org/10.35719/ijic.v3i1.620>
- Said, S. A., & Pratama, F. A. (2020). *METODE DAKWAH PADA KOMUNITAS MARJINAL*. 16, 265–282. <https://doi.org/10.24239/al-mishbah.vol16.iss2.199>
- Sasmita, K., Kuswantono, S., Hadiyanti, P., & Ikhsanudin, I. (2021). *Development of Teaching Materials for Facilitation and Management of Changes in Community Empowerment*. 7. <https://doi.org/10.15294/jne.v7i2.28165>
- Savin-Baden, M., & Wimpenny, K. (2007). Exploring and Implementing Participatory Action Research. *Journal of Geography in Higher Education*, 31, 331–343. <https://doi.org/10.1080/03098260601065136>
- Seim, J. (2021). Participant Observation, Observant Participation, and Hybrid Ethnography. *Sociological Methods & Research*, 53, 121–152. <https://doi.org/10.1177/0049124120986209>
- Setia, P., & Dilawati, R. (2021). Tren Baru Islam melalui Gerakan Hijrah: Studi Kasus Shift Pemuda Hijrah. *Khazanah Theologia*. <https://doi.org/10.15575/kt.v3i3.12708>
- Shamrova, D., & Cummings, C. (2017). Participatory action research (PAR) with children and youth: An integrative review of methodology and PAR outcomes for participants, organizations, and communities. *Children and Youth Services Review*, 81, 400–412. <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2017.08.022>
- Sharpe, P., Greaney, M., Lee, P., & Royce, S. (2000). Assets-oriented community assessment. *Public Health Reports*, 115 2-3, 205–211. <https://doi.org/10.1093/phr/115.2.205>
- Smith, R., & Iversen, O. (2018). Participatory design for sustainable social change. *Design Studies*. <https://doi.org/10.1016/j.destud.2018.05.005>
- South, J., Giuntoli, G., & Kinsella, K. (2017). Getting past the dual logic: findings from a pilot asset mapping exercise in Sheffield, UK. *Health & Social Care in the Community*, 25 1, 105–113. <https://doi.org/10.1111/hsc.12274>

- Sudiapermana, E., & Muslikhah, M. (2020). *The Transformation of Sustainable Community Empowerment Based on Islamic Boarding Schools System*. 6, 36–43. <https://doi.org/10.15294/jne.v6i1.23429>
- Sulastyawati, D. (2020). *Social Inclusion: Practical Strategies to Promote Equality of Socio-Economics in Islamic Economic Framework*. <https://consensus.app/papers/social-inclusion-practical-strategies-to-promote-sulastyawati/a93194bfa1ef52958eff065c1eddd9286/>
- Taliep, N., Lazarus, S., Cochrane, J., Olivier, J., Bulbulia, S., Seedat, M., Swanepoel, H., & James, A. (2020). Community asset mapping as an action research strategy for developing an interpersonal violence prevention programme in South Africa. *Action Research*, 21, 175–197. <https://doi.org/10.1177/1476750319898236>
- Tuğal, C. (2009). Transforming everyday life: Islamism and social movement theory. *Theory and Society*, 38, 423–458. <https://doi.org/10.1007/s11186-009-9091-7>
- Velonis, A., Molnár, Á., Lee-Foon, N., Rahim, A., Boushel, M., & O'Campo, P. (2018). “One program that could improve health in this neighbourhood is ____?” using concept mapping to engage communities as part of a health and human services needs assessment. *BMC Health Services Research*, 18. <https://doi.org/10.1186/s12913-018-2936-x>
- Widiastuti, T., Ningsih, S., Prasetyo, A., Mawardi, I., Herianingrum, S., Robani, A., Mustofa, M. U. Al, & Hady, A. F. (2022). Developing an integrated model of Islamic social finance: toward an effective governance framework. *Heliyon*, 8. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10383>
- Widyastri, S. (2022). Analisis Manajemen Dakwah Pondok Pesantren Dalam Menjadikan Kampung Madinah di Desa Temboro (Studi Fenomenologi di Pondok Pesantren Putra Al-Fatah Temboro). *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah FDIK IAIN Padangsidempuan*. <https://doi.org/10.24952/tad.v4i1.4937>
- Yuliasih, M. (2022). THE ROLE OF DAKWAH IN COMMUNITY EMPOWERMENT IN THE INDUSTRIAL ERA 4.0. *Jurnal Bina Ummat: Membina Dan Membentengi Ummat*. <https://doi.org/10.38214/jurnalbinaummatstidnatsir.v5i1.122>
- Zimmerman, M., Eisman, A., Reischl, T., Morrel-Samuels, S., Stoddard, S., Miller, A., Hutchison, P., Franzen, S., & Rupp, L. (2018). Youth Empowerment Solutions: Evaluation of an After-School Program to Engage Middle School Students in Community Change. *Health Education & Behavior*, 45, 20–31. <https://doi.org/10.1177/1090198117710491>

Zuber-Skerritt, O. (2018). An educational framework for participatory action learning and action research (PALAR). *Educational Action Research*, 26, 513–532. <https://doi.org/10.1080/09650792.2018.1464939>

Zulyadain, Wathani, S., & Abdillah, A. M. (2022). CONTESTATION OF ISLAMISM OVER THE QUR'ANIC INTERPRETATION: A STUDY ON AL-TAFSIR AL-TAUHIDI OF HASAN AL-TURABI. *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat*. <https://doi.org/10.22515/ajpif.v19i2.5699>